

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anton van Hamel, Gerard. 1913. *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandsche Strafrecht, Derde Druk*. De Erven F. Bohn & Gebr. Belinfante's. Gravenhage-Harleem.
- Boot, Machteld. 2001. *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, and War Crimes*. Intersentia. Antwerpen-Oxford-New York.
- Brotodihardjo, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*. PT Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2002. *Pelajaran hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- David, Rene, dan John Brierley. 1985. *Major Legal System in the World Today, Third Edition*. Steven & Sons. London.
- Dwi Nugroho, Adrianto. 2010. *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. PT Citra Adhitya Bakti. Bandung.
- Elfinus Sahetapy, Jacob. 1995. *Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Emong Supardjaja, Komariah. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerpan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*. Penerbit Alumni Bandung. Bandung.
- Engbertus Jonkers, Jan. 1946. *Handboek van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*. E. J. Brill. Leiden.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Fajar. Yogyakarta.
- Ferguson Jr, John. 2010. *White-Collar Crime*. Chelsea House Publisher. Broomall.
- Ficar Hadjar, Abdul, Adnan Pasliadja, Eva Achjani, Yunus Hussein, Yustinus Prastowo. 2014. *Menghukum Pengemplang Pajak Hasil Eksaminasi Publik atas*

Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Tindak Pidana Pajak dengan Terdakwa Suwir Laut. The Legal Resource Center (ILRC) & Indonesian Corruption Watch (ICW). Jakarta.

Fidel. 2015. *Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan, Pembahasan Mulai dari Proses: Penyidikan, Penyerahan kepada Korwas PPNS dan Kejaksaan, serta Proses di Pengadilan Negeri hingga Penahanan atas Kasus yang Menimpa (Orang Pribadi, Yayasan, Perusahaan).* PT Carofin Media. Jakarta.

Fletcher, George. 1998. *Basic Concepts of Criminal Law.* Oxford University Press. New York.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua.* Sinar Grafika. Jakarta.

Hanintyo Sumitro, Ronny. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hendra Winarta, Frans. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa.* Sinar Grafika. Jakarta.

Hiariej, Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi.* Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

_____. 2017. *Hukum Acara Pidana.* Penerbit Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.

Hidayat, Nur. 2013. *Menghindari dan Menghadapi Pemeriksaan Pajak.* PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Husein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Cetakan Pertama.* Books Terrace & Library. Bandung.

Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak, Edisi 5.* Salemba Empat. Jakarta.

Johannes Noyon, Tarquinius, dan Gerard Eduard Langemeijer. 1947. *Het Wetboek van Strafrecht, Vijfde Druk, Eerste deel Inleiding Boek I.* S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon. Uitgevers Het Huis de Grabbe. Arnhem.

Justus Enschede, Christiaan. 2002. *Beginselen van Strafrecht.* Kluwer. Deventer.

Kelsen, Hans. 1944. *General Theory of Law and State.* Russell & Russell. New York.

Kristian, dan Yopi Gunawan. 2013. *Tindak Pidana Perbankan.* Nuansa Aulia. Bandung.

LaFave, Wayne. 2010. *Principles of Criminal Law: Second Edition.* West Academic Publishing. St. Paul-Minnesota.

- Lamintang, P. A. F.. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Cetakan 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Larking, Barry (Ed.). 2005. *IBFD International Tax Glossary Revised 5th Edition*. IBFD. Amsterdam.
- Lembaga Alkitab Indonesia. 2000. *Alkitab dan Kidung Jemaat*. Cetakan Kedua. LAI. Jakarta.
- Maarten van Bemmelen, Jakob, dan W. F. C. van Hattum. 1953. *Hand En Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*. S. Gouda Quint-D. Brouwer En Zoon. Arnhem.
- Mandiri Hadjon, Philipus. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 10 Oktober 1994.
- _____. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.
- Mangaranap Sirait, Timbo. 2019. *Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materiil dan Formil)*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Maroni, dan Sunarto. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. CV Anugrah Utama Raharja AURA. Bandar Lampung.
- Marsyahrul, Tony. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Grasindo. Jakarta.
- Moeljatno. 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana*. Pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-VI Universitas Gadjah Mada. Sitihiinggil Yogyakarta. 19 Desember 1955.
- _____. 1985. *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*. PT Bina Aksara. Jakarta.
- _____. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- _____. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Montesquieu. 2007. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Penerjemah: Khoiril Anam. Nusamedia. Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Muladi, Dwija Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cetakan Pertama*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Hukum di Indonesia*. Ghalia. Bogor.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Adhitya Bhakti. Bandung.
- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Adhitya Bakti. Semarang.
- _____. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Adhitya Bakti. Bandung.
- _____. 2005. *Masalah Kodifikasi, Unifikasi dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam RUU KUHP*. Focus Group Discussion terhadap RUU KUHP. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 25 Juni 2005.
- Nugraha, Safri. 2007. *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*. BPHN. Jakarta.
- Petrus Joseph Pompe, Willem. 1959. *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht, Vijfde Herziene Druk*. N. V. Uitgevers-Maatschappij W. E. J. Tjeenk Willink. Zwolle.
- Podgor, Ellen. 1993. *White Collar Crime*. West Publishing Co. ST Paul Minn.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-Asas hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 2014. *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia (Penyempurnaan dari Makalah tahun 1993)*. Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ritonga, Anshari. 2007. *Pembaharuan Perpajakan dan Hukum Fiskal Formal Indonesia*. Yayasan Bina Baca Aksara. Jakarta.

- Rohatgi, Roy. 2007. *Basic International Taxation, Second Edition Volume II: Practice*. Taxmann Allied Service Pvt. Ltd.. New Delhi.
- Russo, Raffaele (Ed.), Chris J. Finnerty, Paulus Merks, Mario Petriccione. 2007. *Fundamentals of International Tax Planning*. IBFD. Amsterdam.
- Saidi, Muhammad. 2011. *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Seno Adji, Indriyanto. 2007. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. CV Diadit Media. Jakarta.
- Setya Pratiwi, Cekli, Christina Yulita, Fauzi, Shinta Ayu Purnamawati. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Lembaga Kajian Advokasi untuk Independensi Peradilan. Jakarta.
- Setiyo Nomor 2005. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Shokry El-Dakkak, Muhammed. 2000. *State's Crimes Against Humanity: Genocide, Deportation and Torture: From the Perspectives of International and Islamic Laws*. A. S. Noordeen.
- Simons, David. 1937. *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Zesde Druk*. P. Noordhoof. N. V. Groningen-Batavia.
- Singer, Richard, dan Martin Gardner. 1997, *Crimes and Punishment: Cases, Materials and Readings in Criminal Law, Second Edition*. Matthew Bender & Co.. New York.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soemarso, S. R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1974. *Pajak dan Pembangunan*. Eresco. Jakarta.
- _____. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Refika Aditama. Bandung.

- Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Sullivan, Dennis, dan Larry Tifft. 2006. *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*. Routledge Taylor & Francis Group. London-New York.
- Suringa, Hazewinkel. 1953. *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht*. H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V.. Haarlem.
- Tampubolon, Karianton. 2013. *Praktek, Gugatan, dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak*. PT Indeks Permata Puri Media. Jakarta.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang.
- Triwulan Tutik, Titik, dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Utrecht, Ernst. 1960. *Hukum Pidana I*. Penerbitan Universitas. Bandung.
- Vos, H. B.. 1950. *Leerboek van Nederlands Strafrecht, Derde Herziene Druk*. H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V.. Haarlem.
- Wagiman, Wahyu. 2005. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*. Elsam. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wiradipradja, Saefullah. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media. Bandung.
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, Cetakan Pertama*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Zuraida, Ida. 2015. *Bahan Ajar DTSS IDLP Dasar*. Pusdiklat Pajak. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5289).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 sehubungan penggantian atas pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1951).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 sehubungan penggantian atas pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 281).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kungjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Artikel Jurnal

Achid Arifki, Nindi. Penyelesaian Kerugian pada Pendapatan Negara melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal dalam Sistem Perpajakan). *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 1. No. 1. Maret 2019.

Achmad, Ruben. Aspek Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Hukum Doctrinal*. Vol. 1. No. 2. September 2016.

Anton. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. November 2016.

- Aribowo, Irwan. Menelisik Perbedaan Pembetulan SPT dengan Pengungkapan Ketidakbenaran SPT. *Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak. Jurnal PKN STAN*. Vol. 5. No. 6. September 2016.
- B. Ilyas, Wirawan. Kontradiktif Sanksi Pidana dalam Hukum Pajak. *Jurnal Hukum*. Vol. 18. No. 4. Oktober 2011.
- Budi Susilo, Agus. Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4. No. 1. 2015.
- Burnama, Indrajaya. Menikmati Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan. *Artikel Tax Focus*. Vol. 10. No. 1. Desember 2018.
- Christian Nathaniel Mewengkang, Marchelino. Penerapan Kekhususan Sistematis sebagai Limitasi antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 23. No. 10. Juli-Desember 2017.
- Dwi Nugroho, Adrianto. Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia. *Mimbar Hukum*. Edisi Khusus. November 2011.
- Hiariej, Eddy. Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas. *Jentera Jurnal Hukum*. Edisi 16-tahun IV. April-Juni 2007.
- Iskandar. Keabsahan Tindak Pemerintahan dalam Hal Penerbitan dan Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu. *Jurnal Ilmu hukum Jambi*. Vol. 5. No. 1. Maret 2014.
- Kowel, Viva, Thessa F. Y. Sondakh, Ailling I. Pua, Novi S. Budiarmo. Ipteks Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) oleh Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Ipteks Akutansi bagi Masyarakat*. Vol. 2. No. 2. 2018.
- Mangoting, Yenni, Eko Ganis Sukoharsono, Nurkholis. Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akutansi Multiparadigma*. Vol. 8. No. 2. Agustus 2017.
- Neck, Reinhard, dan Friedrich Schneider. Tax Avoidance vs Tax Evasion on Some Determinant of the Shadow Economy. *International Tax and Public Finance*. Vol. 19. 2012.
- Nur Hari Susanto, Sri. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2. No. 1. Maret 2019.

- Setiawan, Yudhi, dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo. Cacat Yuridis dalam Prosedur Sebagai Alasan Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Equality*. Vol. 13. No. 1. Februari 2008.
- Sudirman, Lu, dan Feronica. Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura. *Mimbar Hukum*. Vol. 23. No. 2. Juni 2011.
- Sultony, Arief. Diskresi dalam Penentuan Hasil Pemeriksaan Pajak untuk Ditindaklanjuti Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Vol. 1. No. 1. November 2018.
- Wibowo, Tri. Efektivitas Sanksi Pidana Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Studi Kasus di Pengadilan Pajak Jakarta). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9. No. 3. Desember 2009.
- Zahra, Afni. Penerapan Asas Ultimatum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Jurnal Law Reform*. Vol. 13. No. 1. 2017.
- Zaimah, Toyyibatuz. Efektivitas Sistem Self Assessment dalam Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Jurnal Jurisdictie Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Vol. 7. No. 1. 2016.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Agusta, Mikhael. 2017. Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak dalam Korelasinya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan. *Skripsi*. Program Sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Akbar Nugroho, Ali. 2013. Kebijakan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan dalam Asas Permainan yang Jujur (Fair Play) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. *Skripsi*. Program Sarjana S1 Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Eko Prabowo, Hari. 2009. Tinjauan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemeriksaan Pajak dalam Sistem Self Assessment menurut Asas-asas Perpajakan. *Tesis*. Program Magister S2 Hukum. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Elfinus Sahetapy, Jacob. 1978. Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *Disertasi*. Program Doktor S3 Ilmu Hukum. Universitas Airlangga. Surabaya.

- Ika Pratiwi, Yunita. 2017. Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pajak Penghasilan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. *Skripsi/Tugas Akhir*. Program Studi Diploma 3 Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Lestari, Tania. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Skripsi*. Program Sarjana S1 Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Novenda Sitepu, Dhanty. 2019. Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice). *Skripsi*. Program Sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Parulian Sihotang, Hotditua. 2019. Kontribusi Bentuk Usaha Tetap dalam Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top) Asing untuk Meningkatkan Sumber Pendapatan Negara Dihubungkan dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Skripsi*. Program Sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung.
- Salfadila Hasan, Fiona. 2016. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pemberatan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Skripsi*. Program Sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Supriyadi, Didy. 2013. Voluntary Disclosure dalam Perspektif Hukum dan Implikasinya terhadap Tax Compliance dan Tax Enforcement. *Tesis*. Program Magister S2 Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

Artikel Majalah/Koran

- Elfinus Sahetapy, Jacob. 2003. Asas Retroaktif: Suatu Kajian Ulang. *KHN Newsletter*. Edisi Mei 2003.

Artikel Internet

- Catatan Perpajakan. Mengaktifkan Kembali NPWP Non Efektif. <http://pajaktaxes.blogspot.com/2016/03/mengaktifkan-kembali-npwp-non-efektif.html>. diakses pada 21 Januari 2020.
- Great Export Import. Shipments Analysis. <https://en.52wmb.com/supplier/22459158>. diakses pada 11 Januari 2020.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Direktori Eksportir Indonesia.
<https://kemenperin.go.id/direktori-eksportir?what=a&prov=&hal=109>. diakses
pada 11 Januari 2020.

Mister Eksportir. Perlukah Pemberitahuan Ekspor Barang? Seberapa Penting?.
<https://misterexportir.com/pemberitahuan-ekspor-barang/>. diakses pada 21
Januari 2020.